

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Kualitas Anggaran DKI 2021 Kurang Baik

Gambir, Warta Kota

Kualitas pelaksanaan kegiatan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun 2021 dinilai kurang baik. Hal itu terungkap dari rekomendasi lima Komisi di DPRD DKI Jakarta pada pekan lalu.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, rekomendasi itu diperoleh setelah Komisi A sampai E mengevaluasi dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2021 di Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor selama lima hari pada pekan lalu.

Politikus dari Partai Demokrat ini lalu mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda DKI Jakarta Marullah Matali untuk konsisten menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan komisi-komisi untuk perbaikan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya.

Terutama, kata dia, pada penyerapan anggaran, sehingga bisa meminimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

"Teman-teman Banggar menganggap kurang baik memang kegiatan APBD 2021 ini. Salah satu indikatornya SiLPA yang

tinggi, tandanya banyak anggaran yang nggak keserap," kata Misan pada Senin (5/9/2022).

Meski demikian, Misan memahami kondisi pandemi Covid-19 yang sempat meninggi pada 2021 lalu.

Situasi itu membuat pihak eksekutif kewalahan, sehingga lebih fokus menangani dan menanggulangi Covid-19, dibanding melakukan penyerapan anggaran di sektor lain.

"Rencananya hasil kemarin (rapat P2APBD 2021) akan diparipurnakan pada Selasa (6/8/2022) nanti," imbuhnya.

Misan mengatakan, evaluasi itu telah disampaikan kepada TAPD melalui Rapat Banggar Hotel Grand Cempaka, Kabupaten Bogor pada Jumat (2/9/2022) lalu. Saat itu pimpinan Komisi menyampaikan rekomendasi dan catatannya kepada TAPD.

Tertibkan Aset

Untuk Komisi A bidang Pemerintahan mengimbau agar Pemprov DKI menertibkan aset Pemda yang tidak digunakan, sehingga tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain.

"Proses sertifikasi aset-aset lahan atau tanah milik Pemprov DKI agar

dapat dipercepat dan didokumentasikan dalam bentuk digitalisasi agar mudah mengaksesnya bila diperlukan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Komisi B bidang Perekonomian alam salah satu catatannya mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan perbaikan dalam mekanisme penyusunan perencanaan anggaran, dengan harapan penyerapan bisa lebih optimal.

Salah satunya yakni melakukan meninjau ulang secara jelas terhadap target, output dan outcome program serta kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

"Jika memang program dan kegiatan tersebut peluangnya kecil untuk dilaksanakan, lebih baik tidak diusulkan," Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.

Seperti diketahui Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, nilai SiLPA tahun 2021 adalah Rp 9.721.718.831.341 yang berasal dari surplus sebesar Rp 3.947.969.038.435 dan pembiayaan neto sebesar Rp 5.773.749.792.906. Kata dia, SiLPA 2021 mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 5.165.696.290.359. (faf)